



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019.

Memperhatikan

1. Surat Walikota Surabaya Nomor : 180/10357/436.1.2/2019 tanggal 24 Oktober Perihal Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 172/6198/436.5/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
3. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 07/Komisi.D/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Pengajuan Judul Raperda usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2020;
4. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 06/Kom A/Eks/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
5. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 010/Kom.C/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
6. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 09/Komisi B/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
7. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 26 Oktober 2019;
8. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 02/BPP/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2020;
9. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Kota Surabaya tanggal 30 Oktober 2019;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 4 Nopember 2019;
11. Surat Gubernur Jawa Timur, Tanggal 8 Nopember 2019, Nomor : 188/23198/013.4/2019, Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 10 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020;

- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal : 11 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA



Wakil Ketua,

RENI ASTUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD SURABAYA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL: 11 Nopember 2019

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2020

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengelolaan Fasum		V					1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Badan Perencanaan dan Bangunan.	Komisi A
2.	Pemberdayaan UKM		V					1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Dinas Perdagangan; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Komisi B

3.	Manajemen Kontruksi		V					1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Badan Perencanaan dan Bangunan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 5. Bagian Hukum; 6. Bagian Administrasi Pembangunan; 7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.	Komisi C
4.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		V					Dinas Sosial	Komisi D
5.	Pembentukan Produk Hukum Daerah							Bagian Hukum.	BPP
6.	Penyelenggaraan Perpustakaan		V					Dinas Perpustakaan.	Komisi A

7.	Kelebihan Luas Bangunan		V					1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah.	Komisi B
8.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)		V					1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah.	BPP
9.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010	V					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 2. Bagian Hukum; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan	BPP
10.	Pengelolaan Sampah Medis		V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;	BPP

							3. Dinas Lingkungan Hidup; dan 4. RSUD.	
11.	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan.	Komisi A
12.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V				1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk,	Komisi B

								Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan	
13.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 2. Dinas perhubungan	Komisi C
14.	Kepemudaan	Kepemudaan						1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Dinas Pendidikan; dan 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi D
15.	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; dan 2. Dinas Sosial	BPP
16.	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V			V		1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha	Komisi B

								Mikro; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	
17.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Dinas Koperasi dan usaha Mikro	Komisi D
18.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)		V		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 5. Bagian Hukum	
19.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

								Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	

3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		V	Dinas Perhubungan	
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
6.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		V	Dinas Perhubungan	

7.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V		Dinas Pemadam Kebakaran	
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang		V	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal		V	Dinas Perdagangan	
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman		V			V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	

	tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah							
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon		V	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
11.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Pengenaan Retribusi Penyedotan Limbah Cair Tinja	V		Mencabut Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja	V		Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan		V	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	

	7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			Lingkungan Hidup				
13.	Taman Hutan Raya	Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
14.	Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian	Rencana penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	V		Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi		V	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

					1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun				
16.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Materi Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman		V	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
17.	Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penambahan obyek retribusi izin mendirikan bangunan		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
18.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan	V		Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 6/PRT/M/2017	V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

22.	Penanaman Modal	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23.	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya	Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.	
24.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penambahan jenis/obyek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di unit kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Kesehatan	
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang		V	Dinas Pendidikan	

		Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru						
19.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
20.	Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	V		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
21.	Penyelenggaraan Usaha Pemandoran di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Usaha Pemandoran di Kota Surabaya	V		Mencabut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pemandoran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	V		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014			Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014			
26.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		V	1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung		V	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal : 11. November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA

WAKIL KETUA,

